



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAWIT HARYANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 111181

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.664.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/72 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/50 m² di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/36 m² di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 460.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY CAR BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA G 2.4 DIESEL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 53.150.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 67.131.081

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.244.281.081

III. HUTANG

Rp. 585.749.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.658.532.081

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.